

## Pergeseran Paradigma dari Power-Oriented ke Service-Oriented Governance pada Pemerintah Kota Samarinda

Intan Purbaningrum<sup>1</sup>, Iman Surya<sup>1</sup>, Jauchar B<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia



intan.purbaningrum@gmail.com

### Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pergeseran paradigma tersebut pada Pemerintah Kota Samarinda, faktor-faktor yang mendorong transformasi, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, serta berbagai sumber yang relevan dengan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Kota Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya transformasi melalui reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Pergeseran ini tercermin dari meningkatnya orientasi pelayanan dalam berbagai sektor, termasuk administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, dan pelayanan berbasis teknologi informasi. Namun demikian, implementasi service-oriented governance masih menghadapi sejumlah kendala, seperti budaya birokrasi yang masih berorientasi pada kekuasaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum meratanya kualitas pelayanan antar perangkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur, pengembangan sistem pelayanan digital yang terintegrasi, serta perluasan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pergeseran paradigma ini menjadi fondasi penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prinsip-prinsip good governance.

**Keywords:** Status Women as Witnesses, Position of Women as Witnesses, Islamic Law

### ARTICLE INFO

Received

May 19, 2026

Revised

July 02, 2026

Accepted

August 02, 2026

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Perkembangan paradigma administrasi publik dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam cara pemerintah menjalankan fungsi dan perannya di tengah masyarakat. Jika pada masa lalu penyelenggaraan pemerintahan lebih menitikberatkan pada aspek kekuasaan (*power-oriented governance*), maka saat ini tuntutan masyarakat mengarah pada model pemerintahan yang lebih demokratis, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan (*service-oriented governance*). (Deran dkk., 2026, hlm. 279). Pergeseran paradigma ini merupakan konsekuensi dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya sebagai warga negara sekaligus respons terhadap tuntutan global mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. (Iswari dkk., 2020, hlm. 220). Dalam konteks tersebut, pemerintah tidak lagi dipandang sebagai institusi yang hanya memiliki otoritas untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, melainkan sebagai organisasi publik yang bertugas memberikan pelayanan terbaik kepada warga negara. (Ansori, 2015, hlm. 142).

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, paradigma *power-oriented governance* dicirikan oleh dominasi birokrasi yang bersifat hierarkis, sentralistik, dan berorientasi pada kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Model pemerintahan semacam ini menempatkan masyarakat sebagai objek pembangunan yang memiliki ruang partisipasi terbatas dalam proses

pengambilan keputusan publik.(Fasya & Jiddan, 2026a, hlm. 2981). Akibatnya, pelayanan publik sering kali berjalan secara prosedural dan administratif tanpa memperhatikan kebutuhan serta kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Seiring berkembangnya reformasi birokrasi dan demokratisasi pemerintahan, pendekatan tersebut mulai dianggap tidak lagi relevan untuk menjawab kompleksitas kebutuhan masyarakat modern yang menuntut pelayanan cepat, mudah, transparan, dan berkualitas.(Sugiarto, 2019, hlm. 161).

Sebagai alternatif, konsep *service-oriented governance* hadir dengan menempatkan pelayanan publik sebagai inti dari penyelenggaraan pemerintahan.(Erlangga, 2025, hlm. 7848). Paradigma ini menekankan bahwa keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari kemampuan menjalankan kewenangan dan regulasi, tetapi juga dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan responsif.(Ansori, 2015, hlm. 143). Pemerintah dituntut untuk membangun hubungan yang lebih kolaboratif dengan masyarakat melalui peningkatan partisipasi publik, transparansi informasi, inovasi pelayanan, serta pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, orientasi pemerintahan bergeser dari sekadar menjalankan fungsi kekuasaan menuju upaya menciptakan nilai publik (*public value*) yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.(Saputri dkk., 2025, hlm. 1138).

Pergeseran paradigma tersebut juga menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi di Indonesia. Berbagai kebijakan nasional telah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan birokrasi, penguatan akuntabilitas, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Otonomi daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah semakin memperkuat tuntutan agar setiap daerah mampu menghadirkan pelayanan publik yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.(Saputri dkk., 2025, hlm. 1142). Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan.

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang mengalami dinamika pembangunan yang cukup pesat. Pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik mendorong Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan berbagai inovasi dan transformasi birokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan melalui digitalisasi pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan administrasi, penguatan sistem pengaduan masyarakat, serta penerapan berbagai program reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.(Ilhadi dkk., 2024, hlm. 125). Transformasi tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi pemerintahan dari pola yang berpusat pada birokrasi menuju pola yang lebih berfokus pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Meskipun demikian, proses pergeseran paradigma dari *power-oriented governance* menuju *service-oriented governance* bukanlah proses yang sederhana.(Fasya & Jiddan, 2026b, hlm. 2980). Berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari budaya birokrasi yang masih cenderung mempertahankan pola kerja lama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hingga belum optimalnya integrasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dengan realitas pelayanan yang diterima di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi tata kelola pemerintahan memerlukan komitmen yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan agar perubahan yang diharapkan dapat terwujud secara optimal.(Firmansyah & Haeril, 2024, hlm. 85). Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana pergeseran paradigma dari *power-oriented governance* menuju *service-oriented governance* terjadi pada Pemerintah Kota Samarinda. Kajian ini juga bertujuan mengidentifikasi berbagai bentuk implementasi transformasi tersebut, tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi pemerintahan daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung terciptanya prinsip-prinsip *good governance* di Kota Samarinda.

## METHOD

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap norma, asas, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan operasional Satlinmas dalam struktur pemerintahan daerah.(Sukmawan & Damayanti, 2025, hlm.

120). Dalam membedah problematika tersebut, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi regulasi secara hierarkis, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membangun kerangka pemikiran berdasarkan doktrin dan pandangan para ahli mengenai perlindungan masyarakat.(Syahrizal & Jailani, 2023, hlm. 19). Argumentasi hukum dalam kajian ini dibangun menggunakan bahan hukum primer yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksana terkait Satlinmas.

Kekuatan analisis tersebut kemudian diperkaya dengan bahan hukum sekunder yang mencakup literatur buku, jurnal ilmiah, dan berbagai hasil riset terdahulu yang memiliki relevansi dengan lokus penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul diolah menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memotret secara komprehensif sejauh mana kesesuaian antara perintah norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas implementasinya di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai Timur.(Syahrizal & Jailani, 2023, hlm. 18). Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemecahan masalah yang berlandaskan pada validitas hukum yang kuat serta memberikan rekomendasi konstruktif bagi penguatan institusi Satlinmas di masa mendatang.

## **RESULTS AND DISCUSSION**

### **A. Konsep Pergeseran Paradigma dari Power-Oriented ke Service-Oriented Governance dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan**

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, paradigma *power-oriented governance* merupakan pendekatan yang menempatkan pemerintah sebagai pusat kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.(Ansori, 2015, hlm. 143). Model ini ditandai dengan dominasi birokrasi yang cenderung bersifat hierarkis, sentralistik, serta berorientasi pada kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan pemerintah.(Fasya & Jiddan, 2026b, hlm. 2986). Dalam paradigma tersebut, masyarakat lebih sering diposisikan sebagai objek kebijakan sehingga ruang partisipasi publik dalam proses pemerintahan relatif terbatas. Seiring berkembangnya tuntutan demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas publik, paradigma tersebut mengalami pergeseran menuju *service-oriented governance* yang menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan.(Erlangga, 2025, hlm. 7851). Dalam paradigma baru ini, pemerintah tidak lagi dipandang sebagai pemegang kekuasaan semata, melainkan sebagai pelayan masyarakat yang berkewajiban memenuhi kebutuhan publik secara efektif, responsif, dan berkeadilan.(Ansori, 2015, hlm. 145). Pergeseran ini menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi modern yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.(Iskandar & Pranoto, 2026, hlm. 409).

### **B. Kebijakan dan Komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam Mendorong Service-Oriented Governance**

Transformasi menuju *service-oriented governance* di Kota Samarinda tercermin melalui berbagai kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kota Samarinda berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Berbagai program digitalisasi pelayanan menjadi salah satu indikator adanya perubahan orientasi birokrasi dari sekadar menjalankan fungsi administratif menuju penyediaan layanan yang cepat, mudah, dan transparan.(Ilhadi dkk., 2024, hlm. 125). Selain itu, komitmen pemerintah daerah juga terlihat melalui pengembangan sistem pengaduan masyarakat, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta peningkatan aksesibilitas layanan bagi seluruh lapisan masyarakat.(Islahuddin, 2025, hlm. 37). Kebijakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa keberhasilan pemerintahan daerah tidak lagi diukur dari seberapa besar kekuasaan yang dimiliki, tetapi dari sejauh mana pemerintah mampu memberikan manfaat dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.(Sugiarto, 2019, hlm. 163).

### **C. Implementasi Service-Oriented Governance pada Pemerintah Kota Samarinda**

Implementasi paradigma *service-oriented governance* di Kota Samarinda dapat dilihat dari berbagai inovasi pelayanan publik yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Transformasi pelayanan tidak hanya terjadi pada aspek administratif, tetapi juga mencakup sektor kesehatan,

pendidikan, perizinan, serta pelayanan kependudukan. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan masyarakat memperoleh layanan secara lebih cepat dan efisien tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang berbelit-belit.(Arifin, 2025, hlm. 1034). Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat semakin diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun pengaduan yang kemudian menjadi dasar evaluasi kinerja pelayanan publik.(Iswari dkk., 2020, hlm. 224). Implementasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat mulai bergeser dari pola hubungan vertikal menuju hubungan yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Dengan demikian, pelayanan publik tidak lagi berorientasi pada kepentingan birokrasi, melainkan pada kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

#### **D. Tantangan dalam Pergeseran Paradigma dari Power-Oriented ke Service-Oriented Governance**

Meskipun berbagai upaya transformasi telah dilakukan, proses pergeseran paradigma pemerintahan di Kota Samarinda masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah masih adanya budaya birokrasi yang berorientasi pada kekuasaan dan prosedur formalistik. Sebagian aparatur pemerintahan masih mempertahankan pola kerja lama yang lebih menekankan aspek administratif dibandingkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.(Mozin dkk., 2025, hlm. 239). Selain itu, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan modern juga menjadi hambatan yang perlu mendapat perhatian serius.(Islahuddin, 2025, hlm. 40).

Tantangan lainnya muncul dari belum meratanya kualitas pelayanan antar organisasi perangkat daerah, sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih bervariasi. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi pelayanan publik juga belum sepenuhnya optimal.(Iswari dkk., 2020, hlm. 229). Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa perubahan paradigma pemerintahan tidak hanya membutuhkan pembaruan regulasi dan sistem kerja, tetapi juga transformasi budaya organisasi yang berorientasi pada pelayanan.

#### **E. Strategi Penguatan Service-Oriented Governance pada Pemerintah Kota Samarinda**

Penguatan *service-oriented governance* di Kota Samarinda memerlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat reformasi birokrasi melalui pembangunan budaya kerja yang menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.(Erlangga, 2025, hlm. 7852). Peningkatan kompetensi aparatur sipil negara harus dilakukan secara berkesinambungan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.(Ilhadi dkk., 2024, hlm. 126). Selain itu, pengembangan sistem pelayanan digital yang terintegrasi perlu terus ditingkatkan guna menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan transparan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.

Di samping itu, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan.(Mozin dkk., 2025, hlm. 243). Melalui berbagai strategi tersebut, Pemerintah Kota Samarinda diharapkan mampu mewujudkan transformasi pemerintahan yang tidak lagi berpusat pada kekuasaan birokrasi, melainkan pada pemberian pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

#### **CONCLUSION**

Pergeseran paradigma dari *power-oriented governance* menuju *service-oriented governance* pada Pemerintah Kota Samarinda menunjukkan adanya transformasi yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jika sebelumnya orientasi pemerintahan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan kewenangan dan pengendalian birokrasi, saat ini pemerintah semakin menempatkan pelayanan publik sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan dan program yang dijalankan.(Fasya & Jiddan, 2026b, hlm. 2984). Transformasi tersebut tercermin melalui berbagai upaya reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan transparansi, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.(Arifin, 2025, hlm. 1034). Perubahan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota

Samarinda telah berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan tata kelola pemerintahan modern yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi *service-oriented governance* masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Budaya birokrasi yang masih dipengaruhi pola pikir kekuasaan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kesenjangan kualitas pelayanan antar perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor yang dapat menghambat keberhasilan transformasi tersebut. (Tanggungan dkk., 2026, hlm. 12). Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma pemerintahan tidak hanya membutuhkan pembaruan regulasi dan sistem pelayanan, tetapi juga perubahan budaya organisasi yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pelayanan publik. (Ansori, 2015, hlm. 146).

Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang berkelanjutan untuk memperkuat implementasi *service-oriented governance* di Kota Samarinda. Penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara, pengembangan sistem pelayanan digital yang terintegrasi, serta perluasan ruang partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi tata kelola pemerintahan. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pergeseran paradigma ini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pada akhirnya, *service-oriented governance* tidak hanya menjadi instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kota Samarinda.

## REFERENCES

- Ansori, L. (2015). DISKRESI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 135–150. <https://doi.org/10.35586/v2i1.165>
- Arifin, D. (2025). Integration of Digital Technology in Human Resource Management to Achieve an Adaptive Organization in Deli Serdang Regency. *Jurnal Fokus Manajemen*, 5(4), 1031–1038. <https://doi.org/10.37676/jfm.v5i4.10139>
- Deran, A. H. S., Jamal, M., & Surya, I. (2026). Analisis Kinerja Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Kependudukan Berbasis Good Governance di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Tana Mana*, 7(1), 276–284. <https://doi.org/10.33648/jtm.v7i1.1537>
- Erlangga, D. (2025). INOVASI DAN EFEKTIVITAS MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF DAN BERORIENTASI PADA KEPUASAN MASYARAKAT. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(05 Oktober), 7846–7856.
- Fasya, R. I., & Jiddan, S. A. (2026a). Leadership in the Perspective of Fiqh Siyasah and Its Relevance to the Indonesian Constitutional System. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 5(2), 2979–2991. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v5i2.1872>
- Fasya, R. I., & Jiddan, S. A. (2026b). Leadership in the Perspective of Fiqh Siyasah and Its Relevance to the Indonesian Constitutional System. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 5(2), 2979–2991. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v5i2.1872>
- Firmansyah, F., & Haeril, H. (2024). Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Dalam Upaya Mempertahankan Kualitas Pelayanan Publik. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 83–89. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i3.533>
- Ilhadi, V., Syukriah, S., Rosdiana, R., Asran, A., & Yusuf, E. (2024). Pendampingan Teknologi Informasi Berkelanjutan dalam Peningkatan Pengembangan Digitalisasi di Bidang Pelayanan Publik dan Kearsipan. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 3(1), 121–129. <https://doi.org/10.29103/jmm.v3i1.16696>
- Iskandar, G., & Pranoto, E. (2026). Independensi Pengawas Internal dan Eksternal Birokrasi Publik Serta Implikasinya Terhadap Good Governance. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 19(01), 399–412. <https://doi.org/10.59582/sh.v19i01.1463>
- Islahuddin, M. (2025). Penerapan Konsep Good Governance dalam Pelayanan Publik di Pemerintahan. *Policy and Law Journal*, 2(1), 33–43.

- Iswari, F., Alri, Y., & Mira, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Melalui Konsultasi Publik Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Solok Tahun 2018. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2), 213–231. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1877>
- Mozin, S. Y., Pakaya, R., Musa, A., Supu, H., Syarif, S. W., Kadir, S. S., Datau, N., Rasid, M., & Labino, R. I. A. (2025). Penerapan Prinsip Good Governance sebagai Upaya Menghindari Patologi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Efisien. *Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(2), 235–250. <https://doi.org/10.62383/sosial.v2i2.1738>
- Saputri, N., Prianti, D., Priandana, N. G., Karunia, I., Lauli, A. L., Kurniawan, I., Agustin, M., Bardana, S. A., Fadhilatunnisa, R., Mentari, A., & Kusuma, F. A. (2025). Implementasi Good Governance sebagai Upaya Penguatan Otonomi Daerah di Indonesia. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, 3(6), 1136–1147. <https://doi.org/10.61722/jipm.v3i6.1787>
- Sugiarto, A. H. (2019). FUNGSI KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI. *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 150–172. <https://doi.org/10.53027/jp.v3i2.221>
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Tanggungan, S. S., Thane, S., Melmambessy, D., Toatubun, N., & Subroto, H. (2026). Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Melalui Efektivitas Anggaran Sebagai Variabel Mediasi Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 18(1), 1–19. <https://doi.org/10.55049/xpgxqd03>